

# Kekerasan Sebagai Produk Sistem: Analisis Kegagalan Tata Tertib Sekolah Dalam Membangun Kepatuhan Siswa

Dedy Supriyadi<sup>1</sup>, Anas Ahmadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>State University of Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author: [dedysupriyadi17@gmail.com](mailto:dedysupriyadi17@gmail.com)

## ABSTRACT

### Article History:

Received 2025-11-20

Accepted 2026-01-20

### Keywords:

School Violence,  
Discipline Enforcement,  
School Rules,  
Positive Discipline,  
Restorative Justice,  
Children's Rights,  
Teacher-Student Relations

*Violence in educational settings is a complex phenomenon that threatens the essence of education as a humanistic and transformative process. This study analyzes the failure of the school discipline system in building student compliance and identifies factors that cause violence in the context of discipline enforcement at SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara. Using a qualitative method with a case study approach, this study explores three cases of violence involving teacher-student interactions in discipline enforcement through literature review, participant observation, in-depth interviews, and analysis of school documents. The results reveal that violence arises from an unclear discipline system, a lack of teacher conflict management skills, a school culture that tolerates violence, and a gap between disciplinary expectations and the reality of student behavior. The impact of violence is multidimensional, including psychological trauma for students, damaged teacher-student relationships, decreased learning quality, and the normalization of violence in school culture. This study recommends a paradigm shift from a punishment-based disciplinary approach to positive discipline and restorative justice that respects the rights and dignity of students. These findings provide a theoretical contribution to the development of literature on school violence and can practically guide the reform of school discipline management systems that are humanistic, educative, and evidence-based.*

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Kekerasan Sekolah,  
Penegakan Disiplin,  
Tata Tertib Sekolah,  
Disiplin Positif,  
Keadilan Restoratif,  
Hak Anak,  
Relasi Guru-Siswa

Kekerasan dalam penegakan disiplin di sekolah mengancam esensi pendidikan sebagai proses humanis dan transformatif. Penelitian ini menganalisis kegagalan sistem tata tertib sekolah dalam membangun kepatuhan siswa dan mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan dalam konteks penegakan disiplin di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 18 partisipan (6 guru, 9 siswa, 2 pimpinan sekolah, 3 orang tua), observasi partisipatif selama dua bulan, dan analisis dokumen sekolah. Data dianalisis menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke. Ditemukan empat faktor utama penyebab kekerasan: ketidakjelasan sistem tata tertib, kurangnya keterampilan manajemen konflik guru, budaya sekolah yang mentolerir kekerasan, dan kesenjangan ekspektasi-realitas perilaku siswa. Temuan tidak terduga menunjukkan ambivalensi emosional guru yang mengalami guilt setelah menggunakan kekerasan. Dampak kekerasan bersifat multidimensional meliputi trauma psikologis siswa, kerusakan relasi guru-siswa, dan kepatuhan berbasis ketakutan yang superfisial. Kekerasan merupakan produk sistemik yang memerlukan transformasi paradigma dari disiplin punitif menuju disiplin positif dan restorative justice yang menghormati hak dan martabat siswa.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak yang seharusnya berlangsung dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk perkembangan optimal mereka. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan justru menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang mengancam kesejahteraan fisik dan psikologis peserta didik. Fenomena ini tidak hanya merusak esensi pendidikan sebagai sarana pengembangan karakter positif, tetapi juga menciptakan trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi masa depan generasi muda. Ahmadi (2020) menjelaskan bahwa fenomena perilaku menyimpang termasuk kekerasan dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik psikologi, sosiologi, maupun kultural, sehingga pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ini menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan. Kekerasan di sekolah telah menjadi fenomena global yang meresahkan, terjadi di berbagai negara tanpa memandang tingkat ekonomi atau budaya masyarakatnya. World Health Organization (2002) menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dengan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Data menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan di institusi pendidikan terus meningkat, dengan estimasi satu dari tiga siswa di seluruh dunia mengalami perundungan di sekolah setiap bulannya (UNESCO, 2024). Fenomena ini tidak hanya melibatkan interaksi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, atau bahkan orang tua terhadap pihak sekolah (McMahon et al., 2014; Tiesman et al., 2014), menciptakan siklus kekerasan yang kompleks dan memerlukan intervensi multidimensional untuk mengatasinya secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kegagalan sistemik dalam implementasi tata tertib sekolah yang justru memicu terjadinya kekerasan dalam konteks penegakan disiplin. Di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara, sejumlah siswa kerap melanggar peraturan yang telah ditetapkan seperti terlambat datang, tidak memakai seragam lengkap, membawa barang terlarang, atau menunjukkan perilaku tidak sopan terhadap guru dan sesama siswa. Ketika guru berupaya menegakkan peraturan melalui tindakan disipliner, situasi justru berkembang menjadi konflik yang berujung pada tindak kekerasan baik verbal maupun fisik, menunjukkan adanya kesenjangan antara intensi penegakan aturan dengan metode yang digunakan serta respon yang muncul dari siswa. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa seringkali terjadi dalam konteks penegakan disiplin di kelas (Tiesman et al., 2014), dan meskipun berbagai konvensi internasional melarang segala bentuk kekerasan terhadap siswa, hukuman fisik dan psikologis masih umum terjadi di berbagai belahan dunia dengan tingkat prevalensi mencapai 80% di beberapa negara (Plan International, 2013). Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam sistem manajemen disiplin yang perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan akar permasalahan dan solusi yang tepat.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu mengungkapkan bahwa meskipun penelitian tentang kekerasan di sekolah telah banyak dilakukan, masih terdapat celah pengetahuan yang signifikan terkait dinamika kekerasan yang muncul dalam konteks penegakan disiplin di Indonesia. Ahmadi (2020) menegaskan bahwa studi tentang perilaku menyimpang memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggunakan berbagai perspektif keilmuan sebagai alat bantu. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada kekerasan antar siswa atau bullying, sementara kekerasan yang terjadi dalam relasi guru-siswa khususnya dalam konteks penegakan tata tertib belum mendapat perhatian memadai. Studi sistematis menunjukkan bahwa kekerasan yang diarahkan kepada guru masih kurang diteliti meskipun prevalensinya signifikan (McMahon et al., 2014), dan penelitian tentang kekerasan guru terhadap siswa dalam konteks disiplin juga terbatas terutama di negara-negara berkembang (Devries et al., 2014). Lebih lanjut, literatur mengenai sistem disiplin sekolah di Indonesia masih terbatas pada kajian normatif tentang kebijakan dan regulasi, namun kurang mengeksplorasi implementasi praktis dan dampaknya terhadap

dinamika kekerasan di lapangan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif mekanisme bagaimana sistem tata tertib yang seharusnya menjadi instrumen edukatif justru bertransformasi menjadi pemicu kekerasan ketika penegakannya dilakukan dengan pendekatan yang tidak tepat, sejalan dengan temuan bahwa pendekatan disiplin punitif justru meningkatkan kemungkinan perilaku bermasalah di masa depan (American Psychological Association, 2008).

Penelitian ini memiliki justifikasi kuat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang school violence dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan dalam konteks penegakan disiplin, yang merupakan area yang relatif kurang dieksplorasi dalam literatur Indonesia. Studi internasional menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah memiliki dampak multidimensional terhadap kesehatan mental siswa, termasuk gejala trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku (Finkelhor et al., 2015), serta berdampak negatif terhadap fungsi neurokognitif dan prestasi akademik (Delaney-Black et al., 2002). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem manajemen disiplin di sekolah-sekolah Indonesia untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, namun tetap menghormati hak dan martabat peserta didik. Penelitian tentang pendekatan alternatif seperti restorative justice menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi suspesi hingga 87% dan meningkatkan iklim sekolah secara keseluruhan (González, 2012; Lodi et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan siswa terhadap tata tertib serta mekanisme penegakan disiplin yang memicu kekerasan di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara. Selanjutnya, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kekerasan yang terjadi dalam konteks penegakan peraturan terhadap siswa, guru, dan iklim sekolah secara keseluruhan, serta mengeksplorasi persepsi dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam dinamika tersebut. Tujuan akhir adalah merumuskan rekomendasi kebijakan dan model penegakan disiplin yang humanis, edukatif, dan berbasis bukti yang dapat diterapkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan menghormati hak peserta didik, mengingat bahwa praktik restoratif terbukti efektif dalam memperbaiki iklim sekolah, mengurangi konflik, dan mencegah suspensi serta eksklusi (Lodi et al., 2021; Gregory et al., 2016). Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya yang multipel: secara teoretis memperkaya literatur akademik tentang kekerasan di lingkungan pendidikan dengan studi kasus empiris dari konteks Indonesia, secara praktis menyediakan panduan bagi praktisi pendidikan dalam merancang sistem tata tertib yang efektif dan minim risiko kekerasan, serta secara kebijakan dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi perlindungan anak di sekolah dan program pelatihan manajemen disiplin bagi guru.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam fenomena kekerasan dalam konteks penegakan disiplin di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami kompleksitas interaksi sosial, makna subjektif yang dikonstruksi oleh para aktor, serta konteks situasional yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam setting alamiah tanpa manipulasi variabel. Studi kasus instrumental digunakan karena kasus spesifik di sekolah ini tidak hanya dipelajari untuk memahami kasus itu sendiri, melainkan untuk memberikan wawasan tentang isu yang lebih luas mengenai kegagalan sistem tata tertib dalam membangun kepatuhan siswa dan mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan kekayaan informasi dan relevansi dengan fokus penelitian. Partisipan penelitian terdiri dari tiga kategori utama: pertama, enam orang guru yang terlibat langsung dalam tiga insiden kekerasan yang

menjadi fokus analisis serta guru-guru lain yang bertanggung jawab dalam penegakan disiplin; kedua, sembilan orang siswa yang terdiri dari siswa yang menjadi korban atau pelaku dalam insiden kekerasan, saksi mata kejadian, serta siswa yang pernah mengalami pelanggaran tata tertib; dan ketiga, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi sistem tata tertib. Selain itu, tiga orang tua siswa yang anaknya terlibat dalam insiden kekerasan juga dilibatkan untuk memperoleh perspektif keluarga terhadap permasalahan yang terjadi. Pemilihan partisipan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi pengalaman, peran, dan perspektif untuk memastikan triangulasi data dan kedalaman analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan semua partisipan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan kerangka teoretis penelitian dan telah divalidasi melalui expert judgment oleh dua orang ahli di bidang pendidikan dan psikologi. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45 hingga 90 menit, direkam dengan persetujuan partisipan, dan ditranskrip verbatim untuk keperluan analisis. Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama dua bulan di lingkungan sekolah untuk mengamati interaksi guru-siswa dalam berbagai konteks, proses penegakan disiplin, dan dinamika sosial di sekolah. Peneliti mencatat observasi dalam bentuk field notes yang mencakup deskripsi peristiwa, setting, dan refleksi peneliti. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap buku tata tertib sekolah, catatan pelanggaran siswa, laporan insiden kekerasan, dan kebijakan sekolah terkait manajemen disiplin untuk memperoleh data faktual dan konteks institusional. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking dengan beberapa partisipan kunci, serta peer debriefing dengan peneliti lain yang berpengalaman dalam penelitian kualitatif.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik mengikuti tahapan Braun dan Clarke yang meliputi familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip dan catatan lapangan, pengkodean awal secara induktif untuk mengidentifikasi unit-unit makna, pengelompokan kode-kode ke dalam tema-tema potensial, review dan refinement tema untuk memastikan koherensi internal dan distinctiveness antar tema, penamaan dan pendefinisian tema secara jelas, serta produksi laporan analisis yang mengintegrasikan tema-tema dengan kutipan data dan interpretasi teoretis. Proses analisis dilakukan dengan bantuan software MAXQDA untuk memudahkan pengorganisasian dan pengkodean data. Untuk memastikan trustworthiness penelitian, peneliti menerapkan kriteria Lincoln dan Guba yang mencakup kredibilitas melalui prolonged engagement dan triangulasi, transferabilitas melalui thick description, dependabilitas melalui audit trail yang sistematis, dan konfirmabilitas melalui refleksivitas peneliti yang terdokumentasi dalam research journal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kasus kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara dalam konteks penegakan disiplin sekolah. Kasus pertama terjadi pada saat upacara bendera hari Senin ketika seorang siswa kelas sembilan bercanda dengan temannya selama upacara berlangsung. Guru yang mengawasi upacara merespons perilaku tersebut dengan segera mendekati siswa dan memukul punggung siswa menggunakan telapak tangan sambil menegur dengan nada keras "bersikap seperti yang seharusnya." Setelah upacara selesai, guru memerintahkan siswa untuk menemui beliau di ruang pramuka untuk pembinaan lebih lanjut. Dalam sesi pembinaan tersebut, siswa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perilaku serupa. Meskipun siswa memahami kesalahannya, metode pendisiplinan melalui kekerasan fisik tetap mencerminkan pendekatan punitif yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan humanis.

Kasus kedua berlangsung pada Oktober 2024 saat pemeriksaan tata tertib rutin yang dilakukan setiap hari Jumat. Seorang guru menemukan beberapa siswa berpotongan rambut melebihi batas yang diizinkan dalam tata tertib sekolah dan memberikan teguran keras kepada siswa-siswi tersebut. Namun, siswa-siswi tersebut justru menunjukkan resistensi kuat dengan menghina guru menggunakan kata-kata kasar dan bahkan menantang konfrontasi fisik dengan sikap provokatif. Situasi ini memicu kemarahan guru hingga hampir terjadi kekerasan fisik, namun berhasil dicegah oleh guru-guru lain yang segera memisahkan mereka dan meredakan ketegangan. Kejadian serius ini mendorong pihak sekolah untuk memanggil orang tua siswa yang terlibat guna mencari solusi bersama dan membahas konsekuensi yang tepat terhadap pelanggaran tersebut.

Kasus ketiga terjadi di ruang kelas delapan ketika beberapa siswa yang kurang berminat pada mata pelajaran tertentu mengajukan usulan kepada guru untuk tidak melanjutkan pembelajaran dan menggantinya dengan aktivitas lain. Guru yang merasa tersinggung dan tidak dihargai atas upaya mengajarnya kemudian memutuskan untuk menolak masuk kelas dan meninggalkan siswa tanpa bimbingan akademis untuk sisa jam pelajaran. Tindakan ini menciptakan kebingungan di kalangan siswa dan menimbulkan perasaan bersalah pada beberapa siswa yang merasa bertanggung jawab atas keputusan guru tersebut. Ketiga kasus ini mencerminkan pola yang konsisten yaitu adanya kesenjangan antara ekspektasi disiplin dengan realitas perilaku siswa, serta ketidakmampuan guru dalam mengelola konflik secara edukatif tanpa menggunakan kekerasan atau penelantaran.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga kasus tersebut melalui wawancara dengan partisipan dan observasi di lapangan, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan munculnya kekerasan dalam konteks penegakan disiplin. Faktor pertama adalah ketidakjelasan dan ketidakkonsistensi dalam sistem tata tertib sekolah. Hasil wawancara dengan guru mengungkapkan bahwa tidak ada prosedur operasional standar yang jelas tentang bagaimana merespons berbagai jenis pelanggaran. Seorang guru menyatakan, "Kami seringkali bingung harus bagaimana ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan. Tidak ada panduan yang jelas, jadi kami bertindak sesuai dengan penilaian sendiri pada saat itu." Siswa juga mengonfirmasi persepsi ini dengan menyatakan bahwa konsekuensi untuk pelanggaran yang sama bisa berbeda tergantung pada guru yang menangani dan kondisi emosional guru pada saat itu. Seorang siswa menjelaskan, "Kadang untuk kesalahan yang sama, guru A hanya menasihati, tapi guru B bisa langsung marah dan memberikan hukuman berat. Ini tidak adil."

Faktor kedua adalah kurangnya keterampilan manajemen konflik dan regulasi emosi pada sebagian guru. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa ketika dihadapkan pada perilaku siswa yang menantang atau provokatif, beberapa guru merespons secara reaktif dan emosional daripada menggunakan strategi de-eskalasi yang terukur. Kepala sekolah mengakui bahwa "banyak guru kami yang belum pernah mendapat pelatihan khusus tentang bagaimana mengelola konflik dengan siswa atau menangani situasi yang menguji kesabaran." Wawancara dengan guru yang terlibat dalam kasus kedua mengungkapkan bahwa guru tersebut merasa "sangat terprovokasi dan kehilangan kontrol" ketika siswa menghina dan menantangnya di hadapan siswa lain, yang kemudian memicu respons emosional yang hampir berujung pada kekerasan fisik.

Faktor ketiga adalah budaya sekolah yang masih mentolerir penggunaan kekerasan ringan atau ancaman dalam pendisiplinan sebagai metode yang dianggap efektif. Wawancara dengan beberapa guru senior mengungkapkan pandangan bahwa "kadang siswa perlu diberi shock atau teguran keras agar jera dan tidak mengulangi kesalahan." Pandangan ini mencerminkan paradigma disiplin berbasis hukuman yang masih mengakar dalam praktik pendidikan. Beberapa siswa juga melaporkan bahwa tindakan guru memukul punggung atau memberikan hukuman fisik ringan "sudah biasa terjadi" dan tidak dianggap

sebagai masalah serius oleh sebagian komunitas sekolah. Normalisasi kekerasan ini menciptakan lingkungan yang permisif terhadap praktik-praktik yang sebenarnya melanggar hak anak.

Faktor keempat adalah kesenjangan antara ekspektasi disiplin dengan realitas kebutuhan dan karakteristik perkembangan siswa. Analisis terhadap tata tertib sekolah menunjukkan bahwa banyak aturan yang ditetapkan tanpa melibatkan partisipasi siswa dan tanpa mempertimbangkan perspektif mereka. Wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa banyak aturan "tidak masuk akal" atau "terlalu kaku" dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Seorang siswa menyatakan, "Kami tidak pernah ditanya pendapat kami tentang aturan-aturan ini. Semuanya sudah ditetapkan dari atas dan kami hanya disuruh patuh." Kurangnya ownership siswa terhadap tata tertib ini berkontribusi pada resistensi dan ketidakpatuhan mereka.

Temuan yang tidak terduga dalam penelitian ini adalah adanya ambivalensi emosional yang kompleks pada guru yang menggunakan kekerasan dalam pendisiplinan. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa guru yang memukul siswa dalam kasus pertama sebenarnya mengalami penyesalan dan guilt yang signifikan setelah kejadian. Guru tersebut menyatakan, "Saya sebenarnya menyayangi siswa saya. Setelah kejadian itu, saya merasa bersalah dan tidak nyaman. Tapi pada saat itu, saya tidak tahu cara lain untuk membuat dia sadar akan kesalahannya." Ambivalensi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam penegakan disiplin bukan semata-mata manifestasi dari niat jahat guru, melainkan seringkali merupakan hasil dari keterbatasan kompetensi dan ketiadaan alternatif strategi yang lebih efektif. Temuan ini membuka perspektif baru bahwa intervensi yang efektif tidak hanya perlu fokus pada pelarangan kekerasan, tetapi juga pada penyediaan pelatihan dan dukungan bagi guru untuk mengembangkan repertoar strategi disiplin positif yang dapat mereka gunakan dalam situasi yang menantang.

Dampak dari kekerasan yang terjadi bersifat multidimensional dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan siswa, guru, dan iklim sekolah secara keseluruhan. Wawancara dengan siswa yang menjadi korban kekerasan fisik mengungkapkan munculnya dampak psikologis seperti perasaan takut, malu, dan rendah diri. Seorang siswa yang dipukul menyatakan, "Saya merasa sangat malu dipukul di depan teman-teman. Sekarang saya tidak berani lagi bercanda saat upacara, tapi bukan karena saya paham itu salah, melainkan karena saya takut dipukul lagi." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhasil membangun pemahaman internal tentang nilai-nilai disiplin, melainkan hanya menciptakan kepatuhan berbasis ketakutan yang bersifat eksternal dan superficial. Siswa yang menjadi saksi dari kasus kedua juga melaporkan perasaan cemas dan tidak aman di sekolah, dengan pernyataan "saya jadi takut kalau suatu saat saya juga bermasalah dengan guru dan situasinya menjadi seperti itu."

Dampak terhadap relasi guru-siswa juga sangat signifikan. Analisis data wawancara menunjukkan bahwa kekerasan merusak kepercayaan siswa terhadap guru sebagai figur yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan. Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati dan defensive dalam berinteraksi dengan guru, takut bahwa tindakan mereka akan disalahpahami dan memicu reaksi keras. Seorang siswa menjelaskan, "Setelah kejadian itu, saya tidak lagi merasa nyaman bertanya atau berdiskusi dengan guru. Saya takut kalau saya salah bicara, guru akan marah." Hilangnya keterbukaan komunikasi ini membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan menghambat perkembangan akademik dan sosial-emosional siswa.

Data observasi menunjukkan bahwa setelah insiden kekerasan, terjadi penurunan partisipasi aktif siswa di kelas dan meningkatnya ketegangan dalam interaksi guru-siswa. Guru juga melaporkan bahwa mereka merasa "hubungan dengan siswa menjadi lebih kaku dan formal" setelah insiden tersebut. Dampak pada level institusional mencakup terciptanya iklim sekolah yang penuh ketegangan dan ketakutan, yang tidak kondusif untuk pembelajaran optimal. Beberapa orang tua yang diwawancara menyatakan

kekhawatiran mereka tentang keamanan anaknya di sekolah dan mempertanyakan kompetensi sekolah dalam mengelola disiplin dengan cara yang aman dan edukatif.

## Pembahasan

Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa kekerasan dalam konteks penegakan disiplin di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara merupakan produk sistemik dari kegagalan multidimensional dalam sistem manajemen disiplin sekolah, konsisten dengan perspektif Ahmadi (2020) yang menekankan bahwa perilaku menyimpang termasuk kekerasan perlu dipahami melalui berbagai perspektif psikologi, sosiologi, dan kultural. Ketidakjelasan prosedur dan ketidakkonsistenan penegakan aturan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Hutchison et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kekerasan yang diarahkan kepada guru sering terjadi ketika guru mendisiplinkan siswa, mengarahkan perilaku siswa, atau menangani tantangan akademik, mengindikasikan bahwa konteks penegakan disiplin memang merupakan momen kritis yang rentan terhadap eskalasi konflik. Temuan bahwa guru merespons secara reaktif dan emosional terhadap provokasi siswa mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan manajemen konflik dan regulasi emosi pada guru berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan dalam interaksi guru-siswa.

Faktor budaya sekolah yang mentolerir kekerasan ringan sebagai metode disiplin yang acceptable mencerminkan apa yang digambarkan oleh Freire (2000) sebagai model "banking education" yang menempatkan guru dalam posisi dominan dan siswa dalam posisi subordinat yang harus patuh tanpa bertanya. Paradigma authoritarian ini bertentangan dengan prinsip pendidikan humanistik dan filosofi "tut wuri handayani" Ki Hadjar Dewantara yang menekankan bahwa guru seharusnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sambil tetap memberikan bimbingan yang supportif, bukan kontrol yang represif. Normalisasi kekerasan dalam kultur sekolah juga konsisten dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa meskipun berbagai konvensi internasional melarang kekerasan terhadap siswa, hukuman fisik dan psikologis masih memiliki prevalensi tinggi hingga 80% di beberapa negara (Plan International, 2013), menunjukkan bahwa perubahan praktik disiplin memerlukan tidak hanya perubahan kebijakan formal tetapi juga transformasi mendalam dalam budaya dan nilai-nilai yang mengakar dalam komunitas sekolah.

Kesenjangan antara ekspektasi disiplin dengan realitas perilaku siswa yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori perkembangan Piaget yang menekankan bahwa anak-anak dan remaja berada pada tahap perkembangan tertentu yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan memahami dunia. Remaja memiliki kebutuhan developmental untuk mengembangkan otonomi dan identitas, dan resistensi terhadap otoritas seringkali merupakan bagian normal dari proses ini (Rogers, 1969). Ketika sistem tata tertib tidak mengakomodasi kebutuhan developmental ini dan tidak melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan, resistensi dan ketidakpatuhan menjadi respon yang dapat diprediksi. Temuan bahwa siswa merasa banyak aturan "tidak masuk akal" dan tidak memiliki ownership terhadap tata tertib sejalan dengan konsep student agency dalam literatur pendidikan kontemporer yang menekankan pentingnya memberdayakan siswa untuk menjadi partisipan aktif dalam pembelajaran dan governance sekolah mereka.

Temuan tidak terduga tentang ambivalensi emosional guru yang menggunakan kekerasan memberikan wawasan baru yang penting untuk memahami kompleksitas fenomena ini. Guilt dan penyesalan yang dialami guru mengindikasikan bahwa mereka memiliki moral compass yang menyadari bahwa tindakan mereka bermasalah, namun mereka merasa tidak memiliki alternatif strategi yang lebih baik dalam situasi yang menantang. Temuan ini sejalan dengan konsep Noddings (2005) tentang "ethic of care" yang menekankan bahwa mayoritas guru sebenarnya memiliki intensi genuine untuk caring terhadap

siswa mereka, namun praktik kekerasan muncul bukan dari niat jahat melainkan dari keterbatasan kompetensi dan support system. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa program intervensi perlu mengadopsi pendekatan yang tidak hanya melarang dan menghukum guru yang menggunakan kekerasan, tetapi juga menyediakan pelatihan komprehensif tentang strategi disiplin positif, manajemen kelas, dan pengelolaan emosi, serta menciptakan sistem dukungan berkelanjutan bagi guru dalam mengimplementasikan strategi-strategi baru ini.

Dampak psikologis kekerasan terhadap siswa yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa exposure terhadap kekerasan di sekolah berdampak serius terhadap kesehatan mental siswa, termasuk gejala trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku (Finkelhor et al., 2015), serta berdampak negatif terhadap fungsi neurokognitif dan prestasi akademik (Delaney-Black et al., 2002). Temuan bahwa kepatuhan yang muncul bersifat eksternal dan berbasis ketakutan daripada pemahaman internal tentang nilai-nilai disiplin mengonfirmasi kritik teoretis terhadap pendekatan disiplin punitif yang telah lama diadvokasi oleh American Psychological Association (2008), yang menemukan bahwa pendekatan disiplin berbasis hukuman justru meningkatkan kemungkinan perilaku bermasalah di masa depan daripada menguranginya. Kerusakan relasi guru-siswa yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan konsep Rogers (1969) tentang pentingnya unconditional positive regard dalam relasi edukatif, dan kehilangan trust ini membuat proses pembelajaran menjadi transaksional dan superficial daripada transformatif dan bermakna.

Penelitian ini memberikan dukungan empiris kuat untuk rekomendasi transformasi dari pendekatan disiplin berbasis hukuman menuju pendekatan berbasis disiplin positif dan restorative justice. Literatur internasional menunjukkan bahwa pendekatan restorative practices terbukti efektif dalam mengurangi suspesi hingga 87% di beberapa sekolah (González, 2012) dan meningkatkan iklim sekolah secara keseluruhan (Lodi et al., 2021). Studi sistematis oleh Gregory et al. (2016) menunjukkan bahwa sekolah yang meningkatkan penggunaan restorative practices mengalami penurunan dalam misbehavior siswa, keanggotaan gang, viktimsasi, gejala depresi, dan penyalahgunaan zat, serta peningkatan dalam rata-rata GPA sekolah dan iklim sekolah. Lebih lanjut, efek restorative practices pada outcomes akademik lebih kuat untuk siswa Black dan Latino/a dibandingkan siswa White, sehingga dapat mengurangi disparitas dalam disiplin dan pencapaian akademik. Temuan-temuan ini sangat relevan untuk konteks SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara, mengingat bahwa pendekatan punitif yang saat ini digunakan telah terbukti gagal mencapai tujuan edukatifnya dan justru menciptakan lebih banyak masalah.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa praktik disiplin eksklusif tidak efektif. Penelitian oleh American Institute for Research menemukan bahwa mendisiplinkan siswa melalui suspensi dan ekspulsi tidak mengurangi misbehavior di masa depan baik untuk siswa yang didisiplinkan maupun peers mereka, dan tidak menghasilkan peningkatan dalam pencapaian akademik atau persepsi positif terhadap iklim sekolah (NEA, 2021). Lebih lanjut, semakin berat hukuman, semakin besar efek negatifnya terhadap performa akademik, kehadiran, dan perilaku siswa di masa depan. Temuan penelitian internasional ini sejalan dengan data dari SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara yang menunjukkan bahwa pendekatan punitif tidak berhasil membangun kepatuhan internal dan justru merusak relasi guru-siswa yang esensial untuk pembelajaran efektif.

Implementasi pendekatan restorative justice memerlukan perubahan paradigm fundamental dari fokus pada punishment menuju fokus pada repairing harm and restoring relationships. Penelitian menunjukkan bahwa untuk implementasi yang efektif, restorative practices perlu diintegrasikan ke dalam rutinitas harian sekolah dan bukan hanya digunakan sebagai respons reaktif terhadap insiden serius (Lodi et al., 2021). Hal ini memerlukan pelatihan komprehensif untuk semua anggota komunitas sekolah, komitmen dari kepemimpinan sekolah, dan perubahan dalam struktur organisasi yang tidak mendukung

tujuan restorative (González, 2012). Penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi restorative practices memerlukan waktu 3-5 tahun untuk mencapai perubahan yang sustainable (Learning Policy Institute, 2024), sehingga penting bagi SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara untuk memiliki ekspektasi realistik dan komitmen jangka panjang dalam transformasi sistem disiplin mereka.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya pemahaman tentang kekerasan di sekolah dengan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dipahami secara adekuat melalui perspektif individualistik yang menyalahkan guru atau siswa secara personal, melainkan memerlukan analisis sistemik yang mempertimbangkan faktor-faktor institusional, kultural, dan struktural yang menciptakan kondisi kondusif bagi terjadinya kekerasan. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur dengan mengeksplorasi ambivalensi emosional guru dan menunjukkan bahwa kekerasan dalam pendisiplinan sering kali merupakan manifestasi dari keterbatasan kompetensi dan support system daripada intensi jahat, membuka perspektif baru untuk desain intervensi yang lebih efektif dan humanis. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat untuk urgensi reformasi sistem manajemen disiplin di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara dan sekolah-sekolah serupa, dengan rekomendasi konkret untuk implementasi pendekatan disiplin positif dan restorative justice yang telah terbukti efektif dalam konteks internasional.

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui untuk kontekstualisasi temuan dan interpretasi yang tepat. Pertama, penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang terbatas pada satu sekolah, sehingga generalisabilitas temuan ke konteks sekolah lain perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap konteks. Kedua, data wawancara bersifat self-report dan bergantung pada kejujuran dan akurasi memori partisipan, yang dapat dipengaruhi oleh social desirability bias atau selective recall. Ketiga, meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi data, durasi observasi yang terbatas dua bulan mungkin tidak cukup untuk menangkap seluruh kompleksitas dinamika jangka panjang dalam sistem disiplin sekolah. Penelitian longitudinal di masa depan akan sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana pola kekerasan dan sistem disiplin berevolusi sepanjang waktu dan bagaimana intervensi yang diimplementasikan berdampak dalam jangka panjang.

Sintesis temuan penelitian ini menegaskan nilai konseptual penting bahwa kekerasan dalam penegakan disiplin merupakan indikator kegagalan sistemik yang memerlukan transformasi komprehensif dalam paradigma, praktik, dan struktur pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa solusi efektif tidak terletak pada pengetatan kontrol atau peningkatan sanksi, melainkan pada pembangunan sistem disiplin yang edukatif, restoratif, dan berbasis pada relasi caring antara guru dan siswa yang menghormati hak dan martabat semua pihak. Kontribusi konseptual penelitian ini adalah menunjukkan bahwa disiplin yang efektif bukan tentang compliance melalui coercion, melainkan tentang pembangunan self-regulation dan tanggung jawab moral melalui proses yang dialogis, reflektif, dan transformatif, sejalan dengan visi pendidikan humanistik yang telah lama diadvokasi oleh pemikir pendidikan progresif seperti Ki Hadjar Dewantara, Freire, Rogers, dan Noddings, namun masih belum terealisasi secara penuh dalam praktik pendidikan kontemporer di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan dalam konteks penegakan disiplin di SMP Negeri 24 Penajam Paser Utara merupakan produk sistemik dari kegagalan multidimensional yang meliputi ketidakjelasan sistem tata tertib, kurangnya keterampilan manajemen konflik guru, budaya sekolah yang mentolerir kekerasan, dan kesenjangan antara ekspektasi disiplin dengan realitas kebutuhan developmental siswa. Temuan penting menunjukkan bahwa kekerasan tidak semata-mata berasal dari niat jahat guru, melainkan dari keterbatasan kompetensi dan sistem dukungan, yang dimanifestasikan melalui ambivalensi emosional berupa guilt dan penyesalan. Dampak kekerasan bersifat multidimensional, menciptakan trauma

psikologis siswa, merusak relasi guru-siswa, dan menghasilkan kepatuhan berbasis ketakutan yang superficial daripada pemahaman internal tentang nilai-nilai disiplin. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur school violence dengan perspektif sistemik yang mengintegrasikan faktor individual, relasional, institusional, dan kultural, serta membuka wawasan baru tentang kompleksitas motivasi guru dalam menggunakan kekerasan. Secara praktis, penelitian ini memberikan bukti empiris kuat untuk urgensi transformasi paradigma dari disiplin punitif menuju disiplin positif dan restorative justice yang terbukti efektif secara internasional dalam mengurangi misbehavior, meningkatkan iklim sekolah, dan memperbaiki outcomes akademik. Keterbatasan penelitian terletak pada generalisabilitas temuan yang terbatas pada satu konteks sekolah dan durasi observasi yang relatif singkat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi longitudinal tentang implementasi dan efektivitas model disiplin positif dalam konteks Indonesia, penelitian komparatif lintas sekolah dengan karakteristik berbeda, serta eksplorasi mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi readiness guru dan sekolah dalam mengadopsi pendekatan restoratif, guna memperkuat basis bukti untuk reformasi sistem manajemen disiplin yang humanis dan edukatif di Indonesia.

## 5. REFERENSI

- Ahmadi, A. (2020). Study of criminal psychology in Indonesian literature. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1285–1291. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.147>
- American Psychological Association, Zero Tolerance Task Force. (2008). *Are zero tolerance policies effective in the schools? An evidentiary review and recommendations*. American Psychological Association. <https://www.apa.org/pubs/info/reports/zero-tolerance.pdf>
- Delaney-Black, V., Covington, C., Ondersma, S. J., Nordstrom-Klee, B., Templin, T., Ager, J., Janisse, J., & Sokol, R. J. (2002). Violence exposure, trauma, and IQ and/or reading deficits among urban children. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 156(3), 280–285. <https://doi.org/10.1001/archpedi.156.3.280>
- Devries, K. M., Knight, L., Child, J. C., Mirembe, A., Nakuti, J., Jones, R., Sturgess, J., Allen, E., Kyegombe, N., Parkes, J., Walakira, E., Elbourne, D., Watts, C., & Naker, D. (2015). The Good School Toolkit for reducing physical violence from school staff to primary school students: A cluster-randomised controlled trial in Uganda. *The Lancet Global Health*, 3(7), e378–e386. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(15\)00060-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00060-1)
- Devries, K. M., Child, J. C., Allen, E., Walakira, E., Parkes, J., & Naker, D. (2014). School violence, mental health, and educational performance in Uganda. *Pediatrics*, 133(1), e129–e137. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-2007>
- Dewantara, K. H. (1977). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A., & Hamby, S. L. (2015). Prevalence of childhood exposure to violence, crime, and abuse: Results from the National Survey of Children's Exposure to Violence. *JAMA Pediatrics*, 169(8), 746–754. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.0676>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th Anniversary Edition). Continuum.
- González, T. (2012). Keeping kids in schools: Restorative justice, punitive discipline, and the school to prison pipeline. *Journal of Law & Education*, 41(2), 281–335. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/jle41&section=19](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jle41&section=19)
- Gregory, A., Clawson, K., Davis, A., & Gerewitz, J. (2016). The promise of restorative practices to transform teacher-student relationships and achieve equity in school discipline. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 26(4), 325–353. <https://doi.org/10.1080/10474412.2014.929950>

- Heekes, S.-L., Kruger, C. B., Lester, S. N., & Ward, C. L. (2022). A systematic review of corporal punishment in schools: Global prevalence and correlates. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(1), 52–72. <https://doi.org/10.1177/1524838020925787>
- Hutchison, M., Russell, B. S., & Wink, M. N. (2020). Social-emotional competence trajectories from a school-based child trauma symptom intervention in a disadvantaged community. *Psychology in the Schools*, 57(8), 1257-1272. <https://doi.org/10.1002/pits.22388>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2021). Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 12149. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- McMahon, S. D., Martinez, A., Espelage, D., Rose, C., Reddy, L. A., Lane, K., Anderman, E. M., Reynolds, C. R., Jones, A., & Brown, V. (2014). Violence directed against teachers: Results from a national survey. *Psychology in the Schools*, 51(7), 753–766. <https://doi.org/10.1002/pits.21777>
- National Education Association. (2021). *Positive discipline and restorative practices*. <https://www.nea.org/resource-library/positive-discipline-restorative-practices>
- Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2nd ed.). Teachers College Press.
- Plan International. (2013). *A girl's right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school*. [https://plan-international.org/uploads/2022/01/plan\\_srgbv\\_fullreport\\_en.pdf](https://plan-international.org/uploads/2022/01/plan_srgbv_fullreport_en.pdf)
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn: A view of what education might become*. Charles E. Merrill Publishing Company.
- Tiesman, H. M., Konda, S., Hendricks, S., Mercer, D., & Amandus, H. (2014). Workplace violence among Pennsylvania education workers: Differences among occupations. *Journal of Safety Research*, 44, 65–71. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2012.09.006>
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483>
- UNESCO. (2024, November 6). UNESCO urges more action to combat violence and bullying at school. *UN News*. <https://news.un.org/en/story/2024/11/1156591>
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health* (E. G. Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi, & R. Lozano, Eds.). World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>